



Oleh: A. Ferry T. Indratno

Menyuburkan Multikulturalisme melalui Pendidikan Damai “Peacebuilding Education”

Pendidikan di Indonesia mestinya mulai menerapkan apa yang disebut sebagai Peacebuilding Education (baca: Pendidikan Damai) dengan menolak terhadap berbagai jenis fundamentalisme, serta menghormati multikulturalisme. Pendidikan damai adalah proses demokratisasi karena meliputi bukan hanya hak-hak politik dan hak individu, tetapi juga hak-hak budaya dari suatu kelompok masyarakat. Karena itu, kita perlu merancang masa depan Indonesia secara spesifik multikultural, ini berarti memerlukan pedagogi baru berupa pendidikan damai.

>>> — — — — A. Pendahuluan

Pendidikan damai merupakan media strategis untuk menumbuhkan kesadaran multikultural, terutama dalam kehidupan nyata. Saat ini bukan masanya para pendidik terjebak pada satu alam pemikiran tanpa membuka diri terhadap pemikiran lain. Hal ini perlu dikembangkan oleh para guru dari lembaga berciri khas keagamaan sekalipun. Sikap inklusif perlu juga ditumbuhkembangkan mulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan harus meminimalkan prasangka yang disebabkan oleh pandangan stereotip antar kelompok. Karena itu, kontak antar manusia yang didasari toleransi, saling menghargai dan menghormati, serta persamaan yang tulus menjadi sangat penting.

>>> — — — — *Peacebuilding* ala Indonesia

Sekolah berbasis damai sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Di Davao, Mindanao, Philipina, yang sejak tahun 1960 didera konflik etnik dan agama telah didirikan sekolah damai oleh UPPI (singkatan dari Ustaz, Priest, Pastor, dan Imam). UPPI mengacu pada nama para pemimpin agama yang ada di Mindanao. Sekolah damai UPPI mengajarkan transformasi kultural sehingga para siswa menjadi melek religius, kultural, dan politik serta paham hampir seluruh konflik religius pada dasarnya disebabkan kesempitan wawasan, *prejudice*, kemiskinan (intelektual dan material), ketidakadilan, dan politisasi agama. (Kompas, 20 Juli 2005).

Di Indonesia sekolah berbasis pendidikan damai juga sudah dirintis oleh *World Vision Indonesia* (WVI) di Maluku Utara melalui Program Majalah. Majalah WVI diberi nama Harmonis sebagai wadah pembelajaran bagi terciptanya rekonsiliasi dan perdamaian di Propinsi Maluku Utara (khususnya di Kabupaten Tobelo dan Kota Ternate). Majalah Harmonis yang telah melakukan kegiatan kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2002, bertujuan untuk mendorong dan menstabilkan kehidupan masyarakat yang terkena konflik. Dalam melakukan kegiatannya Majalah Harmonis lebih menekankan pada peningkatan minat belajar anak, menanamkan nilai-nilai perdamaian bagi anak secara khusus dan bagi masyarakat secara umumnya.

Nama Harmonis sendiri merupakan akronim dari kata Harapan-Agar-Rukun dan Makmur-

Orang-orang-Nusantara-Ini-Seluruhnya. Kata Harmonis sendiri menumbuhkan minat masyarakat pasca konflik untuk terlibat dalam aktivitas yang akan mengembangkan damai yang berkelanjutan dan mendorong rekonsiliasi serta menstabilkan masyarakat yang terkena konflik di Maluku Utara.

Majalah Harmonis terbit dwibulanan dengan mengambil 5 topik pendidikan damai, yaitu: menghargai perbedaan, kerjasama, komunikasi, menjadi anak damai (pengelolaan emosi, pembentukan visi) dan pemecahan masalah secara kreatif. Topik ini selalu berulang setiap lima edisi. Lima topik tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya pergeseran dari “paradigma perang” ke “paradigma damai” yaitu dalam sikap, nilai, dan perangai-melalui aktivitas guru sebagai pemimpin masyarakat sipil (*civil society leaders*) dan anak-anak sebagai calon pemimpin.

Untuk daerah lain di Indonesia, pendidikan damai tidaklah sulit untuk diterapkan. Umumnya daerah-daerah di Indonesia sudah memiliki modal kultural yang panjang dalam hidup bertoleransi. Secara konstitusional pendidikan damai juga dimungkinkan dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Dalam UU itu disebutkan pada pasal 4 ayat (1): Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan

kemajemukan bangsa. Rumusan tersebut cukup memadai sebagai landasan untuk melaksanakan pendidikan yang menghargai harkat manusia dan menerapkan pendidikan damai.

Dalam implementasinya, pendidikan damai dimulai dengan Sosialisasi pengertian pendidikan multikultural kepada masyarakat, khususnya kepada guru dan penentu kebijakan. Guru diharapkan mampu memasukkan nilai-nilai damai dalam kegiatan belajar mengajar. Nilai-nilai damai bisa diperoleh dari standar kompetensi untuk masing-masing pelajaran terutama untuk mata pelajaran tertentu seperti: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IPS, Sejarah, Tata Negara, Sosiologi, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan bahasa Daerah.

Selanjutnya pembelajaran pendidikan damai bisa diintegrasikan dengan beberapa pelajaran yang cocok (misalnya IPS, Sejarah, Bahasa Indonesia) atau bisa menjadi mata pelajaran tersendiri dengan nama mata pelajaran Pendidikan Damai dan alokasi waktunya masuk dalam muatan lokal. Sehingga nanti ada muatan lokal pendidikan damai, kalau ini bisa dilakukan maka Indonesia diharapkan berhenti dari berbagai macam konflik.

(Penulis Direktur Dinamika dukasi Dasar, pernah menjadi konsultan *Peacebuilding World Vision Indonesia* di Maluku Utara, sekarang tinggal di Yogyakarta).